

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ali, Lukman. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good governance. Pustaka Unpad.
- Kartiwa, B. (2006). Good Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Pustaka Utama.
- Leny Nofianti. (2015). Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah. Pekanbaru: Mahmudi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2018). Menejemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moenir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Moerwanto, I. (2020). Good Governance dan Pengelolaan Sumber Daya Publik di Indonesia. Jakarta: Penertbit Cerdas.
- Moento, D. L., Muis, M., & Taufiq, A. (2019). Good Governance dalam Pelayanan Publik di Era Reformasi. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Nugroho, Riant. (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Octaviany, Annisa Rahma. (2021), akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan e-ktp pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota tangerang selatan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rifai, M. (2017). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan: Kasus Kabupaten Nagekeo. Yogyakarta: Penerbit Inovasi.
- Rohman, M., & Hanafi, M. (2019). Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
- Rusli, Budiman. 2004. Pelayanan Publik di Era Reformasi, Teropong, Bandung.
- Sedarmayanti. (2009). *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju: Bandung.
- Sedarmayanti, (2009). Good Governance dalam Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Eresco.
- Sinambela. (2011). Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Bumi Aksara
- Sinambela. (2006). Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suryadinata, L. (2019). Administrasi Kependudukan di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Tijjani, R. (2021). Good Governance dalam Pelayanan Publik di Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Iza, I. N., Habibi, M. M., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(3), 215-229.

Andayany, M., & Lanin, D. (2022). Implementasi Pronsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan pembuatan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Kerinci. *Ilmiah Ekotrans dan Erudisi*, 44-37.<https://doi.org/10.69989/dc4y9f33>

Kurniawan, T. (2022). "Implementasi Teknologi dalam Pelayanan Publik di Indonesia: Studi Kasus Disdukcapil Kabupaten Nagekeo." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2, hal. 135-145

Siti Rafa, I., Arif Kurniawan, I., & Rantau, M. I. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga di Kecamatan Benda Kota Tangerang. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-130.

Surahman, S. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik: Studi pada Disdukcapil Kabupaten Nagekeo." *Jurnal Governance*, Vol. 8, No. 1, hal. 101-115.

Peraturan Undang-undang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2006). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2013). Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2019). Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi Kependudukan.

Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018.

KEMENDAGRI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia). "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk Pengelolaan Data Penduduk di Indonesia." Diakses pada 3 Maret 2025, dari: <https://www.kemendagri.go.id/>.

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). "Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia." Diakses pada 5 Maret 2025, dari: <https://www.bappenas.go.id/>.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Good Governance dalam Pemerintahan Daerah: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik." Diakses pada 4 Maret 2025, dari: <https://www.bpkp.go.id/>.

World Bank. "Good Governance in Public Sector Reform."

Washington D.C.: World Bank Group, 2019. Diakses pada 5 Maret 2025, dari: <https://www.worldbank.org/>.

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Nagekeo (2024). "Laporan Tahunan Disdukcapil Kabupaten Nagekeo 2024." Nagekeo: Disdukcapil Kabupaten Nagekeo.



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johannes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 1237/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Asterianus Agung Baje
NIM	:	42119119
Fakultas/Prodi	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik
Dosen Pembimbing	:	1. Marianus Kleden, M. Si 2. Karolus Tatu Sius, SH, M.Si
Judul Skripsi	:	PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGEKEO

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **13 (Tiga Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 10 September 2025

Kepala UPT Perpustakaan,

Silvester Suhendra, S.Ptk